



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Internasionalisasi
Isu Papua Barat (2008-2017)

Skripsi

Oleh

Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

2015330120

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Melanesia Spearhead Group (MSG) dalam Internasionalisasi
Isu Papua Barat (2008-2017)

Skripsi

Oleh

Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

2015330120

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser
Nomor Pokok : 2015330120
Judul : Upaya *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008-2017)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 10 Juli 2019

Pembimbing,

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Sylvia Yazid, Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

NPM : 2015330120

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *Melanesia Spearhead Group* (MSG) dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008-2017)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juli 2019

Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

ABSTRAK

Nama : Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

NPM : 2015330120

Judul : Upaya *Melanesia Spearhead Group (MSG)* dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat (2008-2017)

Sejak Papua Barat bergabung dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1961, terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Situasi ini menciptakan tidak adanya rasa percaya antara masyarakat Papua Barat terhadap Pemerintah Indonesia dalam keberlangsungan hidup mereka. Respon yang lambat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok yang berusaha mencari dukungan di dalam dan luar negeri. Diplomasi yang dilakukan secara internasional difokuskan pada kawasan Pasifik Selatan khususnya sebuah organisasi yaitu, *Melanesia Spearhead Group (MSG)*. MSG merespon dengan melakukan beberapa tindakan yang menjadi upaya untuk mendorong penyelesaian persoalan yang ada di Papua Barat melalui penyuaran isu ini pada forum internasional yang lebih tinggi. Muncul sebuah pertanyaan terkait tindakan yang dilakukan oleh MSG tersebut yaitu, upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh MSG dalam menginternasionalisasikan isu Papua Barat? Untuk mengetahui upaya-upaya tersebut, peneliti menggunakan teori liberalisme institusionalisme, konsep *collective security*, hak asasi manusia serta peran organisasi internasional. Teori dan konsep ini dipilih untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh MSG. Peneliti menemukan bahwa, MSG telah menjadi sebuah instrumen bagi setiap negara anggota untuk mencapai kebijakan nasional mereka; menjadi arena pembahasan penyelesaian persoalan yang terjadi dan aplikasi keanggotaan Papua Barat untuk menjadi anggota penuh MSG; MSG juga menjadi sebuah aktor independen dengan memberikan sebuah pengakuan politik terhadap ULMWP dan menyuarakan Isu Papua Barat di tingkat yang lebih tinggi seperti PIF dan PBB. Penelitian ini berujung pada sebuah kesimpulan bahwa, upaya-upaya yang dilakukan oleh MSG dalam menyuarakan isu ini secara internasional berhasil mendorong pembahasan penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.

Kata kunci: Internasionalisasi; Upaya; Papua Barat; Indonesia; MSG;

ABSTRACT

Name : Dortehea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

NPM : 2015330120

Title : Melanesia Spearhead Group's (MSG) Effort in Internationalization of the West Papuan Issue (2008-2017).

Since West Papua officially became a part of Indonesia's government, there are lots of human rights violations in West Papua. This condition created a lack of good faith between Papua and the government about their survival in the country. Late response in attempting to solve the problem led to the emergence of groups from West Papua to campaign to find support from people inside the country and from international community. This campaign focused to gain support from people in the south Pacific, from an organization called Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG responded by discussing and helping to internationalize the west Papuan issue. A question comes related with these actions from the MSG. What are MSG's efforts to internationalize the West Papuan issue? To know the efforts of the MSG, this research uses the theory of liberalism institutionalism, the concepts of collective security, human rights, and the role of the international organization. These theories and concepts are selected to analyze the role and effort of MMSG regarding this issue. It is found that MSG has become an instrument to all the members to achieve all their foreign policy; become an arena for all the member to come and discuss the issue of West Papua; in addition, MSG also became an independent actor by giving a political recognition to ULMWP and helped West Papua to speak about their issues in a higher international forum such as the Pacific Island Forum and the United Nations. This research concludes that MSG's efforts to internationalize this issue succeeded in pushing for further discussions to resolve the conflicts happening in Papua.

Keywords: Internationalization; Efforts; West Papua; Indonesia; MSG;

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada BAPAKE, Tuhan Yesus yang sudah menyertai penulisan skripsi ini dari seminar hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada dosen pembimbing peneliti yang sudah seperti orang tua penulis selama berkuliah di HI Unpar, Bang Mangadar Situmorang. Terima kasih banyak bang, sudah membimbing saya dari awal penulisan skripsi ini dan selalu mendukung saya. saya sangat bersyukur dibimbing oleh bang Mangadar. Terima kasih banyak juga penulis sampaikan kepada dosen-dosen pembimbing yang memberikan masukan yang sangat membuat skripsi ini semakin baik, Mas Purwadi dan Mas Abe. Penulis juga berterima kasih untuk seluruh dosen-dosen HI Unpar yang begitu keren dalam mengajar dan memberikan ilmu kepada para mahasiswa.

Terima kasih banyak mama, bapa, Occasio, Mario, Haida, yang selalu dukung kk dari awal kk masuk kuliah sampai sekarang kk sudah selesai. Terima kasih om Feri, tante Pamela, Dominic dan Dimaria yang selalu dukung kk selama masa-masa kuliah dan selalu kasih semangat. Terima kasih banyak Kel. Wanena, Kel. Enembe dan Om Jeverson. Terima kasih banyak juga sekolah minggu GKI I.S.Kijne Jayapura. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat penulis, Gloria Ng yang meyakinkan penulis untuk memilih jurusan ini dan selalu memberikan semangat meskipun kita sudah tidak tinggal di negara yang sama. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat penulis, Meigan Banua yang juga meyakinkan penulis untuk mengambil jurusan ini dan mendukung penulis dari awal hingga saat ini.

Terima kasih banyak untuk Melyana Wamea yang temani penulis mendaftar ulang di Unpar dan selalu mendukung penulis. Terima kasih banyak Hana R dan Dinda Wanggai. Terima kasih banyak saudara-saudara seperjuangan dari Awe20me yang di Bandung, Ayu Simangunsong, Hansi Makabori, Eki Talebong dan Armandho W.

Terima kasih banyak juga kepada J4U Bandung terutama Joshua Unpar yang selalu bersekutu dan berdoa bersama dan selalu mendukung penulis (Ko Rudy, Ci Katrin, Bang Lukas, Ersa, Tasya, Elvina dan ka Jeffry). Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kk PA penulis, Lasma Panjaitan yang setia menemani penulis dalam proses-proses yang dialami penulis dan selalu mengingatkan penulis bahwa dalam keadaan apapun, penulis harus selalu memuji Tuhan. Kepada Vania Elisabeth, Vienna Meilina dan saudara PA yang lain. Penulis juga berterima kasih. Kepada kk perempuan penulis, Gabriella Yarangga yang selalu mendukung penulis.

Terima kasih banyak untuk Socrates Disciples, Cogito Ergo Sum – Rene Descartes. Terima kasih banyak untuk ka Berlinda yang selalu mendukung penulis, yang selalu percaya kepada penulis. Terima kasih juga Great KSMPMI, Synergic KSMPMI dan HMPSIHI 16 dan 17.

Terima kasih juga penulis ucapkan untuk teman-teman perjuangan di HI Unpar terutama Journey to the West, Em, Sharon, dan Baban. Juga kepada teman-teman seperjuangan lainnya Vidi, Septiviana, Sari, Florence, Via, Togu, Esther, Athadra, Gleneagels, Gabriella, Stefanie, Yuma, Jordan, Gerald, dan teman-teman HI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Selamat DEFE! Ko hebat bisa selesai tepat waktu. Semangat terus eh!

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Alm. Om Zebulon Ambolon dan Alm. Mgr. Uskup John Philip Saklil.

Bandung, 8 Agustus 2019

Dorthea Elisabeth Frankline Eleanor Wabiser

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1 Metode Penelitian	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
MSG Sebagai Sebuah Organisasi Internasional.....	22
2.1 Sejarah Pembentukan	22

2.2 Visi dan Misi	25
2.3 Isu-isu yang Ditangani.....	26
2.3.1 Front de Liberation Nationale Kanak et Socialist (FLNKS)	26
2.3.2 Lingkungan dan Perubahan Iklim.....	27
2.3.3 Keamanan	29
2.3.4 Kebijakan Sosial	29
BAB III	33
Persoalan-Persoalan yang ada di Papua Barat	33
3.1 Otonomi Khusus.....	33
3.2 Persoalan Hak Asasi Manusia	35
3.3 Persoalan Sosial.....	42
3.3.1 Kependudukan	42
3.3.2 Kesehatan.....	42
3.3.3 Pendidikan	43
3.4 Persoalan Ekonomi.....	44
3.4.1 Sektor Kelapa Sawit.....	45
3.4.2 PT. Freeport Indonesia.....	48
Bab IV	51
Upaya MSG dalam Internasionalisasi Isu Papua Barat.....	51
4.1 Tindakan MSG di Sub-Kawasan Pasifik Selatan	59
4.2 Internasionalisasi Isu Papua Barat oleh MSG	64
4.3 Teguran dan Masukan untuk Pemerintah Indonesia	65
4.4 Bentuk Dukungan terhadap Papua Barat.....	67
4.5 Perkembangan Terkini Isu Papua Barat	69
Bab V	71
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Rekomendasi	73

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMP	: Aliansi Mahasiswa Papua
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women
CPO	: Crude Palm Oil
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ECC	: Environment and Climate Change
FLNKS	: Front de Liberation Nationale Kanak et Socialist
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICP	: International Coalition for Papua
IGO	: International Governmental Organization
IRA	: Ireland Republican Army
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KOMNAS	: Komisi Nasional
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MBCI	: Melanesia Blue Carbon Initiative
MGCF	: Melanesia Green Climate Fund
MGG	: Melanesia's Green Growth Framework
MIFEE	: Merauke Integrated Food Energy Estate
MRP	: Majelis Rakyat Papua
MSG	: Melanesia Spearhead Group
MTC	: Melanesia Terrestrial Commitment
NFRPB	: Negara Federal Republic Papua Barat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
OTK	: Orang Tak Dikenal
OTSUS	: Otonomi Khusus
PANSUS	: Panitia Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCC	: Police Commissioners Conference
PEPERA	: Penentuan Pendapat Rakyat
PIF	: Pacific Islands Forum
PICWP	: Pacific Islands Coalitions for West Papua
PM	: Prime Minister

PNG	: Papua New Guinea
PNWP	: Parliament National of West Papua
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SCE	: Subcommittee on Sport
SKP	: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPNPB	: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
UUD	: Undang-Undang Dasar
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
ULMWP	: United Liberation Movement for West Papua
UNCEN	: Universitas Cendrawasih
UNCI	: United Nations Commissions for Indonesia
UNDP	: United Nations Development Program
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNIPA	: Universitas Papua
UNTEA	: United Nations Temporary Executive Authority
WCC	: World Council of Church
WPNCL	: West Papua National Coalition for Liberation

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penandatanganan Agreed Principles of Cooperation Among Independent States in Melanesia, Port Villa, Vanuatu (14 Maret 1988)	24
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Agreed Principles of Co-operation among Independent States in Melanesia.....	89
Lampiran 2. 19 th MSG Leaders' Summit Communique.....	92
Lampiran 3. 20 th MSG Leaders' Summit Communique.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas hal-hal terkait seperti dasar negara dalam bentuk undang-undang dan juga mengenai luas wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyelenggarakan rapat khusus untuk membicarakan luas wilayah Indonesia yang diinginkan. Terkait dengan Papua, menurut pendapat Prof Muhammad Yamin, Papua menjadi penting untuk menjadi bagian dari Indonesia karena memiliki ikatan sejarah. Pada jaman Kerajaan Majapahit dan saat Indonesia sedang ‘ditempa’ menjadi sebuah negara, beberapa pahlawan nasional menjadi tawanan di Boven Digoel. Sehingga, ia berpendapat bahwa meski pemahaman politik belum ada pada masyarakat Papua, baik geografi maupun sejarah menunjukkan bahwa Papua Barat termasuk bagian dari Indonesia.

Pendapat lain diberikan oleh Hatta yang mengatakan bahwa di bagian timur nusantara memang terdapat bentuk campuran, namun orang tidak boleh menjadikan alasan tersebut untuk begitu saja *mencaplok* orang-orang Papua ke dalam Indonesia. Setelah berdiskusi, dirumuskanlah tiga opsi kemudian

dilakukanlah pemungutan suara. Mayoritas anggota rapat memilih opsi yang diberikan oleh Yamin.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, salah satu agenda yang harus dibicarakan adalah penyusunan suatu naskah UUD. Namun dalam naskah yang disusun tersebut tidak ada pembahasan mengenai wilayah dan pembagiannya. Presiden Soekarno saat itu meminta agar dibentuk sebuah panitia kecil untuk membahas hal-hal yang mendesak termasuk pembahasan pembagian negara menjadi delapan provinsi. Pembagian tersebut kemudian menjadi lampiran dalam UUD. Papua dikategorikan sebagai bagian dari Provinsi Maluku. Namun pada kepemimpinan Latuharhary, Papua tidak terlalu diperhatikan sehingga, Papua kembali ke tangan Belanda.¹

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Papua menjadi salah satu agenda pembahasan. Terjadi perdebatan antara Indonesia dan Belanda dalam mempertahankan Papua sehingga, perwakilan UNCI (*United Nations Commissions for Indonesia*) secara *informal* mengusulkan bahwa Papua akan tetap berada di bawah pemerintahan Belanda selama satu tahun lalu akan dirundingkan kembali. Juga disetujui bahwa, akan dibicarakan tentang hak internal bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB terkait pertanyaan apakah mereka akan membentuk suatu negara bagian sendiri.²

¹ P.J. Drooglever. *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, trans. Jan Riberu (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 127-129

² Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas*, 172

Berbagai diplomasi dan tindakan dilakukan hingga pada tahun 1969 agar proses penentuan pendapat berjalan dengan lancar. Delapan pertemuan direncanakan untuk melaksanakan kegiatan pemilihan bebas yang disebut dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Pertemuan tersebut akan dilakukan secara berurutan di Merauke, Wamena, Nabire, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Setiap pertemuan dijalankan secara berulang dengan pidato yang diberikan oleh Frans Kaisepo, dimana ia mengsketsakan latar belakang kejadian (pepera) yang akan dilaksanakan; Pidato juga diberikan oleh Ortiz Sanz yang mengatakan bahwa peristiwa penentuan pendapat rakyat ini sangat penting karena pemilih memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara rakyat. Dengan cara inilah, 'Irian' secara satu suara menyatakan diri bergabung untuk selamanya dengan republik.³

Namun, dibalik hasil pemilihan yang dilakukan, hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan baik dan terus mengalami dinamika sejak Mei 1963. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat empat persoalan mendasar yang menjadi penghambat hubungan antara Jakarta dan Papua yaitu: 1) masih adanya perbedaan pemahaman terhadap sejarah integrasi dan status politik Papua; 2) masih terjadinya kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua; 3) pembangunan di Papua yang belum sepenuhnya berhasil; 4) masih terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Akibat dari belum terselesaikannya ke empat masalah utama

³ Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas*, 744-746

tersebut, masyarakat Papua akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia.⁴ Tidak adanya rasa percaya dari masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah menjadi alasan konflik antara masyarakat dan pemerintah terus terjadi.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Salah satu aktor yang berpengaruh dalam usaha masyarakat Papua dalam menginternasionalisasi isu Papua Barat adalah Diaspora Papua. Namun, diaspora tersebut belum bergerak dengan signifikan di dalam dinamika politik di tanah Papua sebelum tahun 2008. Menurut Robin Osborne dan Bilweer Sing, diaspora Papua sebenarnya telah dilakukan pada masa 1962-1965 oleh orang-orang seperti Markus Kaisepo, Nicholas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Namun, karena berada di tempat yang berbeda dan jauh maka usaha mereka tidak memberikan dampak yang signifikan terkait situasi politik di Papua.⁵

Setelah tahun 2000-an, saat persoalan yang terjadi belum juga direspon oleh pemerintah, muncul aktor-aktor baru yang ikut bergerak mendukung Papua Barat. Mereka adalah kelompok yang muncul di Papua, dari wilayah-wilayah lain di Indonesia serta kelompok yang ada di dunia

⁴ Muridan S Widjojo et al., *Papua Road Map* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

⁵ Suma Riella Rusdiarti and Cahyo Pamungkas, *Updating Papua Road Map* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.171

internasional. Para aktivis yang berada diluar Indonesia gencar untuk mencari dukungan lewat kampanye dan melakukan diplomasi ke berbagai negara. Salah satu wilayah yang menjadi fokus diplomasi adalah wilayah Pasifik.⁶

Terdapat beberapa respon dari negara-negara di Pasifik terhadap usaha kemerdekaan yang diupayakan. Negara-negara tersebut seperti, Vanuatu yang dapat dikatakan adalah pendukung utama dalam perjuangan nasionalis Papua merdeka. Pada saat kemerdekaan Vanuatu, Father Walter Likni mengatakan bahwa Vanuatu belum merdeka sepenuhnya jika bagian Melanesia yang lain, khususnya Papua, masih tetap dijajah oleh kekuatan asing. Hubungan Vanuatu dan Papua semakin diperkuat dengan dibukannya kantor perwakilan Papua yang didirikan di Port Villa sejak tahun 2013. Kedua, Kepulauan Solomon, yang pada tahun 2013, Perdana Menteri Solomon saat itu, Gordon Darcy Lilo secara terbuka mengakui keprihatinannya atas situasi HAM di Papua dan mendorong agar isu Papua dapat dibicarakan dalam forum-forum di Pasifik. Ketiga, Tuvalu yang dengan terbuka menggunakan forum internasional seperti PBB guna mendorong review terhadap *New York Agreement* 1942 dan Pepera 1969. Keempat, Pemerintah Nauru yang secara tegas telah menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Pada *Millenium Summit* yang diselenggarakan tanggal 7 September 2000, Presiden dan Menteri Luar Negeri Bernanrd Dowiyogo menghimbau negara-negara untuk memberikan referendum demokratis bagi Papua untuk menentukan

⁶ Rusdiarti dan Pamungkas, *Updating Papua Road Map*, 172

nasib sendiri. Ia juga meminta kepada PBB agar memperhatikan Papua sehingga tidak terjadi kehancuran yang sama seperti di Timor Timur. Masih banyak lagi beberapa negara yang secara nyata mendukung gerakan kemerdekaan seperti PNG, Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Selandia Baru.⁷

Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh masyarakat Papua dalam isu kemerdekaan adalah dengan membentuk WPNCL (*West Papua National Coalition for Liberation*) pada tahun 2008 melalui sebuah konsultasi internal di Vanuatu. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkuat kampanye internasional dan mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. WPNCL mewadahi lebih dari 19 organisasi perlawanan di dalam dan diluar Papua. Pada bulan Maret sampai bulan Mei 2013, WPNCL melakukan lobi-lobi bilateral kepada negara-negara anggota MSG selain PNG. Pada awalnya, negara-negara anggota MSG memberikan dukungan terhadap masuknya WPNCL ke dalam organisasi subkawasan tersebut bahkan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama beretemu para nasionalis Papua dan Wakil Ketua WPNCL, Otto Ondowame guna mendorong WPNCL agar memasukan aplikasi keanggotaan ke MSG. Lobi politik yang dilakukan oleh WPNCL membuahkan hasil dengan diagendakannya persoalan Papua dalam pertemuan MSG pada Juni tahun yang sama di Noumea, Kaledonia Baru. Hal ini

⁷ Elvira Rumkabu, "ULMWP: 'Self Determination, Diplomasi Pasifik dan Dinamika Internasional,'" dalam *Oase Gagasan Papua Bermartabat*, (Jakarta: Imparsial, 2017), 90-99

menjadikan MSG forum diplomatik pertama yang mengundang perwakilan Papua tanpa harus berdiri di belakang Vanuatu seperti sebelum tahun 2013. WPNCL pertama kali mendaftarkan diri sebagai peninjau dalam MSG pada Januari 2013.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Seperti yang telah tertulis pada deskripsi masalah, usaha yang dilakukan oleh aktivis Papua untuk pembebasan Papua Barat dari NKRI telah terjadi bahkan sejak tahun 1960an hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada tahun 2008 hingga tahun 2017 dimana, dalam kurun waktu ini, isu internasionalisasi Papua Barat terutama di Pasifik Selatan, dan tindakan yang dilakukan oleh MSG terlihat lebih nyata dalam fungsinya sebagai organisasi internasional. Peneliti memilih tahun 2008 dikarenakan, pada tahun tersebut adalah tahun dimana MSG resmi memiliki perangkat sebagai sebuah organisasi internasional dan berhenti pada tahun 2017 mengikuti perkembangan internasionalisasi tahun tersebut.

1.2.3 Perumusan Masalah

Persoalan Papua Barat telah berkembang menjadi sebuah isu internasional. Hal ini bisa terjadi karena berbagai aktor turut mengambil bagian untuk mencari dukungan bagi Papua Barat. Kampanye dan diplomasi

kemudian dilakukan di wilayah Pasifik khususnya terhadap negara-negara yang memiliki identitas dan budaya yang sama dengan masyarakat Papua Barat yaitu negara-negara Melanesia. Ketika isu ini menjadi isu ras Melanesia, MSG sebagai organisasi kawasan di kawasan tersebut mulai merespon persoalan ini. Hal itu membawa peneliti kepada sebuah pertanyaan, Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh MSG dalam menginternasionalisasikan isu Papua Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang MSG lakukan sebagai organisasi internasional dalam membawa isu Papua Barat secara internasional untuk mencari dukungan dari aktor-aktor internasional. Upaya-upaya ini diharapkan membuat persoalan yang terjadi di Papua Barat dapat dibahas secara internasional dan mendorong penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penulis-penulis selanjutnya yang memiliki perhatian yang sama dengan topik penelitian ini atau terhadap apa yang terjadi di kawasan Oceania agar dapat berpikir lebih

kritis dalam mengkaji persoalan yang ada di kawasan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi output pada bidang yang mengkaji Ilmu Hubungan Internasional di kawasan khususnya kawasan Pasifik.

1.4 Kajian Literatur

Terkait dengan isu Papua Barat serta hubungannya dengan MSG, beberapa ahli yang memiliki perhatian khusus terhadap isu ini menulis sejumlah literatur yang berhubungan dengan isu ini. Seorang penulis bernama Stephanie Lawson, dalam sebuah artikel jurnal yang ditulisnya dengan judul: "*Regionalism and Colonialism in Contemporary Oceania*",⁸ berisi tentang dua contoh kasus dari politik di kawasan yang mengilustrasikan sebuah kontradiksi yang muncul dalam pendekatan tradisional terhadap analisis kolonialisme. Kedua contoh tersebut adalah Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis yang sudah merupakan anggota resmi dari *Pacific Island Forum (PIF)* namun status mereka masih merupakan wilayah kolonial Perancis; serta klaim Indonesia terhadap Papua barat yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun klaim ini telah diakui di dalam hukum internasional sejak tahun 1969, klaim Indonesia juga dapat dikatakan sebagai bentuk kolonialisme karena dasar klaim yang tidak jelas dan mencurigakan.

⁸ Stephanie Lawson, "Regionalism And Colonialism In Contemporary Oceania", *The Round Table* 106, no. 2 (2017): 143-153, doi:10.1080/00358533.2017.1296710.

Stephanie Lawson juga menulis lebih lanjut mengenai Isu Papua Barat dan MSG di dalam sebuah artikel jurnal dengan judul “*West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing Logics in regional and international*”.⁹ Pada artikel tersebut, ia menjabarkan usaha dari Papua Barat untuk bergabung menjadi anggota resmi dari MSG, aspek-aspek utama peran Indonesia di wilayah Melanesia yang melihat bahwa dalam perkembangannya, telah muncul kompetisi antara Papua Barat dan Indonesia di dalam politik kawasan dan internasional.

Literatur lainnya ditulis oleh Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon dengan judul: “*MSG Headache, West Papuan Heartache? Indonesia’s Melanesian Foray*”.¹⁰ Tulisan tersebut berisi analisis tentang alasan Indonesia berusaha mengakui dirinya sebagai bagian dari masyarakat Pasifik untuk menetralkan upaya yang dilakukan oleh Papua Barat dalam politik di kawasan Pasifik antara masyarakat Melanesia khususnya di MSG.

Literatur-literatur tersebut ditulis berdasarkan pandangan Indonesia terkait dengan permasalahan yang terjadi di Papua Barat. Ketiga literatur tersebut tidak menulis lebih jauh mengenai apa yang dilakukan oleh MSG sebagai sebuah organisasi sub-kawasan dalam upaya mereka menginternasionalisasi isu Papua Barat. Sehingga, pada tulisan ini, peneliti akan melihat lebih jauh mengenai tindakan yang dilakukan oleh MSG dengan berfokus kepada MSG sebagai aktor

⁹ Stephanie Lawson, "West Papua, Indonesia And The Melanesian Spearhead Group: Competing Logics In Regional And International Politics", *Australian Journal Of International Affairs* 70, no. 5 (2016): 506-524, doi:10.1080/10357718.2015.1119231.

¹⁰ Jim Elmslie dan Camellia Webb-Gannon, “MSG Headache, West Papuan Heartache? Indonesia’s Melanesian Foray,” *The Asia-Pacific Journal* 12, no. 3 (November 2014) <https://apjif.org/2014/12/47/Jim-Elmslie/4225.html>

utama bukan kepada Indonesia seperti yang telah ditulis dalam ketiga literatur tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pembahasan utama mengenai topik yang peneliti bawa berfokus pada tindakan internasionalisasi yang dilakukan oleh aktor utama yang peneliti teliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari internasionalisasi adalah sebuah proses, cara, perbuatan menginternasional atau menginternasionalkan.¹¹ Topik ini juga berdasar dari pemikiran teori liberalisme institusionalisme. Menurut para pemikirnya, teori ini adalah teori yang dapat mempromosikan kerja sama antar negara. Untuk mencapai perdamaian dalam dunia internasional, teori ini mengatakan bahwa negara harus bekerja sama dan mendorong masing-masing negara berdaulat untuk menciptakan sebuah komunitas terpadu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; serta agar negara-negara merespon masalah keamanan di tingkat kawasan dan internasional.¹²

Berbeda dengan pemikiran realisme, liberalisme institusionalisme memiliki karakteristik seperti, memiliki banyak sumber yang memungkinkan interaksi

¹¹ “Internasional”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada 5 Agustus 2019, <https://kbbi.web.id/internasional>

¹² “Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?,” E-International Relations Student, Diakses pada 2 Maret 2018, <http://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>

antar aktor-aktor internasional; Interaksi yang dimaksud berujung pada pembentukan sebuah institusi.¹³

Menurut Keohane, pada teori liberalisme institusionalisme, terdapat beberapa peran dari sebuah institusi yaitu: menyediakan arus informasi dan peluang untuk bernegosiasi; meningkatkan kemampuan sebuah pemerintahan dalam mengambil keputusan yang pasti dengan cara memantau negara lain agar patuh di dalam sebuah perjanjian; dan memperkuat ekspektasi yang berlaku mengenai solidaritas terhadap perjanjian internasional.¹⁴ Teori ini juga mengutarakan perhatian yang merata terhadap berbagai isu sehingga tidak ada perbedaan antara *high politics* dan *low politics*.

Dengan pemikiran bahwa isu-isu yang di bahas pada teori liberalisme institusionalisme adalah isu-isu yang bervariasi bukan saja isu *high politics*, hal ini mengantar peneliti kepada dasar pemikiran berikutnya yaitu sebuah hukum universal yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini dimiliki oleh seluruh umat manusia bukan karena pemberian di masyarakat atau hukum positif namun semata-mata karena martabatnya sebagai

¹³ Ibid.

¹⁴ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 112.

manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menolak eksistensi HAM pada diri manusia.¹⁵

Perkembangan HAM secara internasional terjadi setelah Perang Dunia II dimana dunia mengalami kehancuran yang luar biasa akibat dari perang. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional pada tahun 1945, mempengaruhi perkembangan HAM di kemudian hari. HAM menjadi konsep internasional tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁶

Gagasan mengenai HAM dibangun atas prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara karena walaupun begitu, manusia tetaplah manusia. Kesetaraan yang dimaksud menyaratkan harus adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama, setiap orang harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda, setiap orang diperlakukan juga dengan berbeda. Sehingga, pelanggaran terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. UDHR menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain: ras, warna kulit,

¹⁵ Andrew Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 2-3.

¹⁶ Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, 5-6.

jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya.¹⁷

Konsep HAM adalah konsep yang terkait dengan aktor-aktor yang ada di dunia internasional mulai dari individu hingga aktor non-negara. salah satu contoh adalah PBB, sebuah organisasi internasional yang mengambil bagian dalam mempromosikan HAM di dunia internasional agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Kepentingan bersama yang dimiliki oleh setiap negara untuk melindungi HAM setiap warga negara merekalah yang membuat negara-negara tersebut menandatangani setiap perjanjian internasional yang berhubungan dengan mempromosikan dan melindungi HAM. Sehingga, peneliti juga akan menggunakan konsep *collective security* sebagai salah satu lensa analisis yang akan digunakan.

Menurut Georg Schwarzenberger penulis dari buku *A Manual of International Law dan Foreign Investments and International Law*,¹⁸ *collective security* adalah “*machinery for joint action in order to prevent or counter any attack against and established international order*”. Dengan kata lain, *collective security* adalah sebuah alat (tindakan bersama) untuk menjaga tatanan internasional yang sudah mapan. Menurut ahli lain, Palmer dan Perkins, “*Collective Security clearly*

¹⁷ Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, 10-12.

¹⁸ Georg Schwarzenberger Books - Biography And List Of Works - Author Of 'A Manual Of International Law', Biblio.Com, Last modified 2019, <https://www.biblio.com/georg-schwarzenberger/author/1798054>.

implies collective measures for dealing with threats to peace."¹⁹ Kedua definisi ini memiliki arti yang sama yaitu bahwa *collective security* adalah tindakan bersama untuk menjaga perdamaian pada tatanan internasional.

Tujuan dari *collective security* adalah untuk mencegah negara manapun melanggar hukum internasional atau yang hendak melakukan tindakan yang mengancam. Di bawah sistem ini, negara-negara tetap mempertahankan kontrol penuh terhadap kebijakan luar negeri mereka dan juga berjanji untuk menghadapi setiap ancaman bukan dengan kekuatan sendiri tetapi dengan kolektif sebagai cara yang lebih efektif untuk menghentikan ancaman tersebut dan menegakkan hukum internasional.²⁰

Penekanan dari konsep ini adalah pada penegakan hukum internasional dan terhadap tindakan agresif atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara. sehingga, konsep ini dipahami sebagai alternatif dari konsep *alliance-against-alliance* dan *balance-of-power*. Bukan sebagai suatu koalisi negara melawan kekuasaan yang lain namun *collective security* adalah gabungan dari negara yang 'taat hukum' melawan negara pelanggar hukum internasional dan ancaman.²¹

Konsep ini berorientasi secara kawasan dan global sehingga, dapat menjadi salah satu alasan bagi negara-negara untuk bekerja sama pada sebuah institusi dalam menghadapi ancaman seperti sebuah organisasi internasional. Hal tersebut

¹⁹ "Collective Security: Meaning, Nature, Features And Criticisms", Your Article Library, Last modified 2019, <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/collective-security-meaning-nature-features-and-criticisms/48490>.

²⁰ Paul R Viotti and Mark Kauppi, *International Relations And World Politics* Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc., 2013, 188

²¹ Ibid

membawa peneliti kepada konsep lainnya yang akan digunakan oleh peneliti sebagai kaca mata untuk menganalisis topik yang dibawa. Konsep tersebut adalah organisasi internasional.

Bentuk organisasi di dalam hubungan internasional dapat dilihat dalam sebuah institusi, dimana institusi adalah sebuah struktur dasar dari organisasi internasional yang terbentuk melalui hukum atau oleh tradisi yang sudah ada. Jenis institusi pun berbeda-beda mulai dari perdagangan, diplomasi, konferensi hingga organisasi internasional. Organisasi internasional, dalam konteks ini merepresentasikan sebuah institusi yang mengacu pada sebuah tujuan dan aturan-aturan formal, memiliki administrasi, serta memiliki unsur-unsur material dan teknis seperti: konstitusi, bangunan, perlengkapan fisik, emblem, kop surat, hierarki administratif dan sebagainya.²²

Organisasi internasional, khususnya antar pemerintah adalah organisasi yang anggotanya termasuk lebih dari tiga negara yang memiliki aktivitas di beberapa negara dan anggota-anggota tersebut disatukan melalui sebuah perjanjian internasional yang resmi. Anggota sebuah organisasi internasional dapat berasal dari satu wilayah kawasan yang sama atau berasal dari seluruh kawasan (contoh: Bank Dunia). Beberapa organisasi internasional dirancang untuk memiliki satu tujuan (contoh: OPEC), dan ada juga beberapa organisasi lainnya dirancang dan dikembangkan untuk memiliki beberapa tujuan seperti PBB. Keanggotaan pemerintah di dalam organisasi internasional antar pemerintah kebanyakan

²² Clive Archer, *International Organization*, (London: Routledge, 2001), 2

bukanlah di ranah global saja namun juga di kawasan. Organisasi kawasan memiliki persamaan yang kemudian menjadi minat dan motivasi negara untuk bekerja sama dalam isu-isu yang memiliki dampak terhadap negara anggota.²³

IGOs memiliki fungsi yang berbeda-beda termasuk mengumpulkan informasi, memantau apa yang terjadi, memberikan bantuan, menyediakan forum untuk negosiasi, serta menyelesaikan permasalahan yang lintas batas negara. Fungsi ini mendorong IGOs untuk menimbulkan sikap untuk bekerja sama melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Negara-negara bergabung dalam sebuah organisasi internasional agar dapat berpartisipasi dalam diskusi pada sebuah forum yang stabil saat terjadi masa-masa krisis yang perlu reaksi cepat. Mereka bergabung agar dapat bernegosiasi dan mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang berisi kepentingan masing-masing negara maupun kepentingan bersama. Mereka berpartisipasi juga untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi. Negara anggota tetap dapat mempertahankan kedaulatan yang mereka miliki. IGOs tidak hanya menyediakan peluang bagi negara anggotanya namun mereka juga dapat mempengaruhi dan memberlakukan batasan terhadap kebijakan dan proses yang dimiliki oleh negara anggotanya.²⁴

Organisasi internasional menurut Clive Archer, memiliki tiga peran utama di dalam sistem internasional yaitu sebagai instrumen, arena dan aktor. Sebagai instrument, organisasi digunakan sebagai alat kebijakan internasional; menjadi

²³ Margareth Kans and Karen Mingst, *International Organizations The Politics and Processes of Global Governance*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc.), 7

²⁴ Ibid, 8-9.

alat untuk diplomasi oleh negara berdaulat yang berbeda; organisasi digunakan untuk mewujudkan kebijakan nasional negara anggota karena kordinasi secara multilateral adalah tujuan yang berkelanjutan dari pemerintah nasional. Kedua, organisasi internasional berperan sebagai sebuah arena. Pada peran ini, organisasi berfungsi sebagai sebuah forum tempat untuk memutuskan sesuatu dan bertindak; menyediakan tempat untuk negara anggota dapat datang dan berdiskusi, berbincang, bekerja sama atau bahkan saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda. Sehingga, sebagai arena, organisasi internasional haruslah netral. Peran ketiga yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah sebagai sebuah aktor yang independen. Dengan peran ini, organisasi internasional dapat bertindak di dalam dunia internasional sebagai sebuah negara tanpa harus dipengaruhi oleh pihak eksternal.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan prosedur kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri, menurut John W. Creswell adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan berdasarkan sebuah metodologi untuk meneliti masalah sosial atau masalah yang berhubungan dengan manusia agar dapat

dipahami.²⁵ Metode penelitian ini menggunakan berbagai asumsi filosofis; strategi untuk meneliti; dan menggunakan metode pengumpulan data, analisis serta interpretasi dari peneliti. Berikut adalah beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yaitu: (a) peneliti cenderung mengumpulkan data di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti; (b) peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data dari wawancara, pengamatan, dan dokumen yang bersangkutan dengan topik penelitian dan tidak bergantung dengan sebuah data tunggal; (c) penelitian kualitatif menggunakan lensa atau teori untuk melihat penelitian seperti perbedaan gender, ras atau kelas dari orientasi teoritis; (d) peneliti membuat interpretasi dari apa yang mereka lihat, dengar dan pahami; dan (e) dalam penelitian, peneliti mencoba untuk mengembangkan gambaran yang kompleks mengenai masalah yang diteliti.²⁶

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat empat tipe dasar dari teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan cara observasi, melalui dokumen serta dari bahan-bahan audio-visual (gambar, rekaman video).²⁷ Teknik pengumpulan data yang akan

²⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (California: SAGE Publications, Inc., 1998), 15.

²⁶ John W. Creswell, *Research Design* (California: SAGE Publication, Inc. 2009), 173-176

²⁷ Op.cit., 15

digunakan oleh peneliti adalah observasi. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari buku, jurnal, laporan dan artikel-artikel yang terdapat di internet dan juga dengan mencari data di salah satu lembaga yang meneliti mengenai Isu Papua barat seperti LIPI.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab yang berbeda. Pada bab pertama, berisi mengenai latar belakang terjadinya isu Papua Barat yang berisi sejarah integrasi antara Papua Barat dan Indonesia, kondisi Papua Barat yang sekarang serta perjalanan internasionalisasi isu Papua Barat di wilayah Pasifik khususnya Pasifik Selatan.

Pada bab kedua, peneliti berfokus kepada aktor internasional yang telah peneliti pilih untuk dikaji yaitu *Melanesia Spearhead Group* (MSG). Bab ini berisi informasi mengenai MSG mulai dari sejarah pembentukan organisasi sehingga profil dari MSG.

Pada bab ketiga, peneliti menulis mengenai persoalan yang terjadi di Papua Barat dan usaha-usaha dari aktivis Papua untuk menginternasionalisasi melalui diplomasi dengan negara-negara lain agar dapat mendukung kemerdekaan Papua Barat terutama usaha yang dilakukan terhadap negara-negara yang berada di Pasifik.

Pada bab keempat, peneliti membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh MSG di dunia internasional terkait dengan Isu Papua Barat dan berisi analisa oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat di dalam perumusan masalah.

Pada bab kelima, berisi kesimpulan dari apa yang telah peneliti tulis dan analisa pada bab sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan mengenai apakah tindakan yang dilakukan oleh organisasi sub-kawasan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam internasionalisasi isu Papua Barat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Peneliti juga memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk penelitian yang lebih lanjut terkait topik ini.